

**MENGGAGAS KURIKULUM MULOK
TEROBOSAN BERBASIS KEARIFAN BUDAYA NUSANTARA
(Rekonstruksi Pengalaman *Sedulur Sikep* Sukolilo, Pati, Jawa Tengah)**

Nur Said

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
Email: nursaid@stainkudus.ac.id

Abstract :

Initiated by none other than education to defend humanity as a whole through physical and psychological dimensions. Therefore, education can not be reduced merely to deliver students a mere material satisfaction, while the value immersial as social, spiritual and transcendental. Therefore, the curriculum should be developed on the basis of social conditions, culture and history which is held up the process of education or it is called place-based education. This brief paper will try to indigenious community "Sedulur sikep" perspective or better known as Samin in scrutinizing the school children which is not sensitive to social phenomena such as natural disasters and the environmental sustainability. Important message of this paper asserts that the most basic education is delivered into the individual learners who have senses of curiosity, so they still learn though it is complete / graduate school at their level. So awareness of lifelong learning woke up and could open eyes and mind to always seek and find wisdom so that the parts coming civilized community will wake up.

Keywords : Sedulur Sikep, School Based Curriculum Development (SBCD), Transition, Local Knowledge

Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir ini di lereng pegunungan Kendeng mulai Pati hingga Rembang, Jawa Tengah sedang terjadi pro-kontra tentang pembangunan industri semen. Pihak yang mendukung dipelopori oleh pemerintah daerah, sementara pihak yang menolak justru dari elemen masyarakat yang di dalamnya termasuk sebagian komunitas adat *Sedulur Sikep* (Samin).

Berbagai perlawanan tanpa kekerasan sudah dilakukan mulai dari aksi damai jalan kaki dari Sukolilo Pati, ke PTUN Semarang, pembuatan video dokumentar, hingga aksi pengecoran kaki oleh sembilan “Kartini” dari Pati dan Rembang di depan istana negara Jakarta beberapa bulan yang lalu. Penolakan oleh kelompok kontra adalah demi kelestarian lingkungan dan kesinambungan budaya menjadi tani secara utuh (*dadi tani utuh*) sebagai visi hidup komunitas *Sedulur Sikep*. Mereka antara lain beralasan bahwa industri semen di lereng pegunungan Kendeng akan merusak ratusan mata air yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan di lingkungan tersebut yang berdampak terjadinya bencana alam dan bencana budaya (Said, 2009).

Fenomena “perseteruan” pro kontra samin dan semen tersebut sangat relevan dijadikan awal refleksi dunia pendidikan yang sedang mengalami disorientasi karena pendidikan kita meski telah mengalami berbagai perubahan kurikulum, namun tetap saja yang menonjol orientasi pada pasar kerja yang tercerabut dari nilai-nilai tradisi dan kontes sosial lingkungannya (Darmaningtyas, dkk., 2014). Hal ini mengesankan peserta didik seakan hanya dipersiapkan menjadi –meminjam istilah Mochtar Bukhori- sebagai “tukang-tukang” yang siap sebagai tenaga kerja yang menghasilkan keuntungan material (*profit oriented*). Maka tak berlebihan kalau Gus Mus menengarai fenomena bangsa ini bak hidup di “negeri daging”. Dalam sajak Gus Mus bertajuk “Negeri Daging” dinyatakan:

*“di negeri daging
setiap hari banyak orang
asyik memperagakan daging
setiap hari banyak orang
hilir-mudik menjajakan daging
di negeri daging
setiap hari banyak orang mati
memperebutkan daging
di negeri daging
jagal-jagal berkeliaran
daging-daging berserakan*

Ketika pendidikan cenderung materialistik, segalanya diukur dari untung-rugi secara ekonomik belaka, maka hal ini sama artinya dengan mengkondisikan peserta didik menjadi hedonistik-materialistik, terasingkan dari nilai-nilai moral-spiritual. Maka jangan heran kalau yang terbangun adalah justru –meminjam istilah Koentjoroningrat- budaya *nrabas*, ingin memperoleh kepuasan hidup secara instan. Dalam dunia pendidikan fenomena ini dapat terlihat dari berbagai oknum-oknum guru tertentu yang menginginkan kelulusan peserta didiknya dalam ujian nasional (UN), namun dengan berbagai kecurangan berjamaah. Bagi peserta didik tradisi *njiplak/nyontek* sebagai hal yang biasa. Banyak mahasiswa malas mengerjakan tugas sehingga harus dilimpahkan kepada orang lain. Dan yang lebih parah lagi tugas akhir/skripsi yang semestinya menjadi barometer berpikir

sistematis dan komprehensif seringkali dalam banyak kasus malah diserahkan kepada “tukang-tukang” tadi.

Dampaknya, mereka akan terasing di lingkungannya sendiri atau dalam bahasa Jawa mereka sebagai “*wong jowo ananging ora njawani*”, bahasa Jawa tidak akrab, warisan-warisan budaya Jawa juga tidak peduli. Maka jangan heran kalau kekayaan budaya Jawa yang kaya pada akhirnya diangkut ke negeri asing. Tentu masih segar diingatan kasus Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia, perburuan naskah-naskah klasik nusantara oleh berbagai kelompok negara asing, serta kasus “lagu sayange”. Selama sang pemilik budaya tak lagi peduli, maka cepat atau lambat kuasa milik akan direbut oleh bangsa asing.

Yang lebih parah lagi, ketika lingkungan kelompok terdidik terancam bencana akibat *ulah* dari para kaum kapitalis, mereka tak lagi sensitif karena nuraninya terselubing oleh semangat hedonis sesaat. Fenomena tersebut sebagian saja potret transisi pendidikan yang oleh Gus Mus disebutkan sebagai “negeri daging”. Ada apa dengan dunia pendidikan kita?

Maka ketika *Sedulur Sikep* menilai orang sekolahan bisanya hanya menjadi penonton atas nasib dan masa depan kelestarian lingkungan; kesuburan tanah, air dan udara bersih, tradisi bertani, tentunya perlu dijadikan bahan refleksi atas konsep dan implementasi kurikulum di berbagai jenis dan jenjang sekolah selama ini. Maka paper ini akan membahas tiga hal pokok: (1) Pemahaman kembali atas konsep kurikulum; (2) Muatan lokal terobosan dalam kurikulum 2013; (3) Mitigasi bencana *Sedulur Sikep* sebagai muatan lokal terobosan.

Rethinking Pemahaman Kurikulum

Masih sering terjadi kesalahpahaman dalam sebagian kalangan pendidik yang memahami kurikulum sekedar dokumen, bahkan sebagian menganggap kurikulum sekedar sebagai mata pelajaran. Hal ini berakibat pada proses pembelajaran (*instructional*) seakan hanya menyampaikan materi pelajaran (*transfer of knowledge*) saja, kering dari nilai. Maka ketika tema-tema inti bahasan sudah disampaikan, proses pembelajaran sudah dianggap selesai, lalu tinggal membuat soal-soal untuk ujian. Pembelajaran lalu sekedar menjalan “ritual akademik” yang kering makna karena spirit *meaningfull learning* tak ada lagi.

Padahal pemahaman kurikulum setidaknya dapat dilihat dalam tiga sisi; *pertama* kurikulum sebagai konstruksi gagasan/ide yang kemudian terformulasikan dalam wujud dokumentasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang merencanakan kualitas pembelajaran atau dalam bahasa Oliva *curriculum itself is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas* (Oliva, 1997:12). Karena itu setiap penyelenggaraan proses pembelajaran tak lepas dari adanya konsep/ide tertentu dalam menggapai tujuan pembelajaran. Pada sekolah-sekolah formal ide/konsep tersebut ada yang tertulis dalam wujud dokumentasi kurikulum, namun dalam sekolah non-formal seperti pesantren biasanya jarang yang memiliki dokumen tertulis secara sistematis namun hal ini bukan berarti pesantren tidak memiliki kurikulum. Pemahaman kurikulum pada tingkat ini biasa disebut dengan kurikulum potensial.

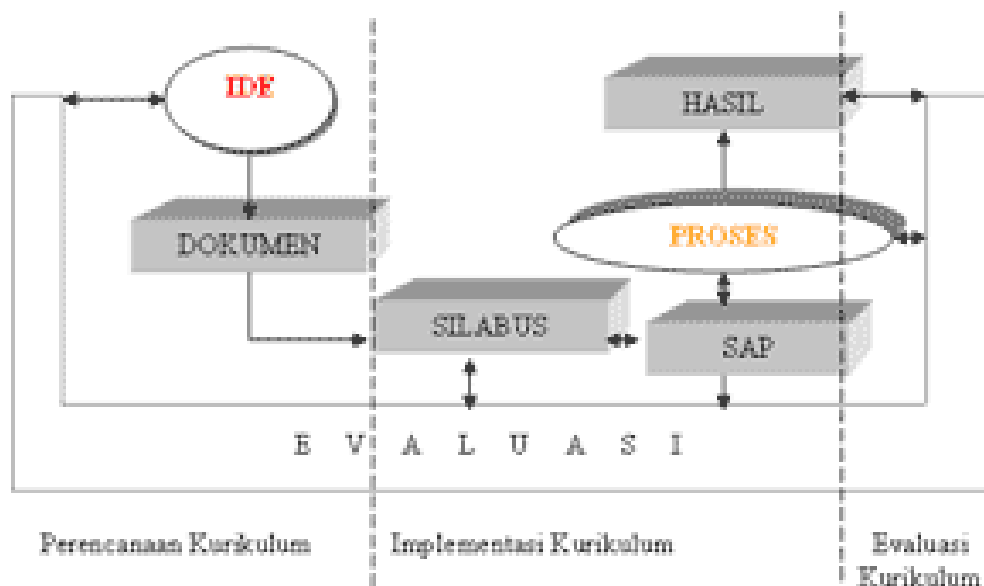
Kedua, kurikulum juga dapat dilihat dalam sisi sebagai implementasi, *in some cases, implementation has been identified with instruction* (Miller and Seller, 1985). Karena itu dalam sisi kurikulum sebagai implementasi proses pembelajaran dalam hal ini dapat disebut sebagai kurikulum nyata (*real curriculum*). Dalam konteks ini pemahaman mengenai pengertian implementasi ternyata mengalami pergeseran/perkembangan yang lebih progresif.

Miller and Seller setidaknya memetakan tiga pergeseran; (1) pengertian implementasi yang paling tua (konvensional) yakni memahami implementasi kurikulum sebagai suatu

peristiwa (*event*) pembelajaran antara guru dan peserta didik yang terjadi karena melaksanakan suatu program/dokumen yang dirumuskan oleh pihak lain yang kemudian dikenal dengan perspektif *fidelity*. (2) Implementasi yang dipahami sebagai suatu proses interaksi antara para pengembang kurikulum dengan para guru. Dalam proses ini ada upaya *mutual adaptation*, yg berhubungan dgn studi tentang bagaimana inovasi tersebut diadaptasi selama implementasi tersebut dilaksanakan. Sehingga dalam perspektif *mutual adaptation* ini inovasi menjadi suatu keniscayaan. (3) Implementasi dipahami sebagai komponen yang terpisah dari lingkaran kurikulum. Dengan pengertian ini maka implementasi kurikulum menuntut perencanaan yang matang bahkan kalau perlu didahului dengan workshop terkait perencanaan tersebut sehingga proses implementasi bisa benar-benar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman ketiga ini sejalan dengan persepektif *curriculum enactment*, yang menekankan proses partisipatoris antara guru dan peserta didik dalam suatu lingkungan sehingga *construct* kurikulum yang terbangun dari bawah (*bottom up*) siap terimplementasikan secara matang (Miller and Seller, 1985).

Karena itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konteks implementasi kurikulum terkait dengan komponen-komponen pembelajaran antara lain rumusan tujuan, isi, metode, media dan evaluasi (Wina Sanjaya, 2008). Agar imlementasi kurikulum bisa berjalan dengan baik maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip implementasi kurikulum yaitu antara lain (Prof. Dr. H. Oemar Hamalik, 2007) ialah: (1) Perolehan kesempatan yang sama terhadap peserta didik secara demokratis dan berkeadilan, (2) berpusat pada anak (*student centered*), (3) Pendekatan dan kemitraan yang tepat sesuai tingkat kemauan, pemahaman, nalar dan pengetahuannya, (4) kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan artinya antara kepentingan nasional, lokal dan internasional harus berjalan seimbang tanpa ada yang terabaikans sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang memiliki kualitas komparatif dan kompetitif.

Untuk membantu pemahaman tersebut menarik mencermati bagan (Prof. Dr. Said Hamid Hasan, 2008) sebagai berikut:



Muatan Lokal dalam Kurikulum 13

Penjelasan di atas mempertegas bahwa kurikulum harus bisa melayani kebutuhan masyarakat pembelajar/peserta didik sesuai dengan konstruk sosial budayanya. Maka Olivi (1992:39-41) menegaskan *curriculum is a product of its time. . curriculum responds to and is changed by social forced, philosophical positions, psychological principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history*. Dengan kata lain suatu proses pembelajaran harus digali dari akar budaya dan latar sejarah yang melatarbelakanginya dan seimbang antara kebutuhan lokal, nasional dan global.

Keberadaan Kurikulum 2013 yang baru saja diberlakukan sebenarnya secara potensial bisa dikembangkan dengan semangat penyusunan kurikulum berbasis dari bawah yang di dalamnya terdapat muatan lokal. Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar: (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan (3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Karena itu setiap satuan pendidikan memiliki peluang mengembangkannya Kurikulum berbasis budaya nusantara baik secara aktual maupun tersembunyi sebagai *hidden curriculum*. Karena itu perlu perancangan dan pengembangan kurikulum yang selaras dengan nuansa batin dari kondisi sisial budaya dimana satuan pendidikan itu diselenggarakan.

Dalam perencanaan implementasi ini tetap perlu memperhatikan filosofi pendidikan pada hakekatnya tak lepas dari dua proses: (1) proses hominisasi, yaitu memosisikan manusia sebagai makhluk hidup di dalam dunia atau ekologiannya. Karena itu pendidikan didamping harus mengkondisikan peserta didik sadar akan jatid dirinya yang hidup dalam suatu bangsa dengan suatu ikatan budaya dan filsafat hidup yang menjadi ideologi bersama, juga perlu sadar akan realitasnya yang hidup dalam sebuah sub-kultur dengan segala keunikan nilai dan budaya lokal yang disinggahinya. (2) proses humanisasi, memosisikan manusia sebagai makhluk yang bermoral (akhlak). Sebagai makhluk bermoral, manusia tak sekedar hidup, tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi sebagai manusia yang berbudaya berikut kesadaran religiusitas yang dimilikinya (H.A.R. Tilaar, 1985:). Disamping itu pendidikan juga memiliki *habitus* masyarakat pembelajar yang beridentitas dengan segala kekayaan modal sosial, budaya dan modal simbolik yang perlu

dimaknai dan berdayakan sehingga menjadi tindakan bermakna (Pierre Bourdieu, 1990 & 1986).

Karena itu dalam pengembangan Kurikulum 13 (K13) perlu memperhatikan keunikan lokasi dan suasana sosial budaya dimana pendidikan dan pembelajaran itu diselenggarakan. Karena itu agar pendidikan tetap mempertahankan ideologi bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan juga tidak tercerabut dari tradisi dan potensi lokal yang ada, maka perlu melandasi semangat pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan lokal atau populer disebut *place-based curriculum development* (PBCD) atau dalam istilah Laurie Brady (1983) disebut sebagai *School-Based Curriculum Development* (SBCD). PBCD merupakan pengembangan kurikulum yang berbasis pada teori pendidikan berbasis lokasi (*place-based education*) yaitu konsep pendidikan dengan pendekatan holistik yang lebih mengedepankan pengembangan masyarakat dan konservasi lingkungan agar berkelanjutan secara progresif. Dalam prosesnya berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan konteks lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, geografi) peserta didik dari semua usia.

Mengingat K13 juga mengamanatkan adanya komponen mata pelajaran muatan lokal (mulok) yang dalam panduan penyusunan KTSP diartikan sebagai kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada, atau materinya terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan (Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013).

Hal ini berarti bahwa setiap satuan pendidikan diberikan kesempatan mendesain Muatan Lokal sesuai kebutuhan daerahnya. Namun karena belum siapnya SDM di daerah, kebijakan K13 dengan muatan lokalnya ini seringkali justru menjadi persoalan tersendiri, sehingga muatan lokal yang ada, sekedar ada untuk memenuhi kewajiban UU atau Permen, tidak melalui penggalian dan penelusuran yang serius dari kekayaan khazanah budaya atau potensi lokal di daerah yang bersangkutan. Padahal di Indonesia ini masing-masing daerah kaya akan khazanah budaya nusantara yang unik dan genuin.

Ketika sebuah daerah setiap tahun dilanda bencana alam secara rutin, maka satuan pendidikan di daerah tersebut juga bisa mengantisipasinya dengan mulok berupa mitigasi bencana sebagaimana dilakukan di kabupaten Bantul, Aceh dan seterusnya. Bencana alam sering kali sulit dicegah. Namun, memitigasi bencana (*disaster mitigation/reduction*) sehingga risiko bahaya dapat diminimalisasi bukanlah hal yang tidak mungkin (Yoshiaki Kawata, 2007).

Mitigasi Bencana *Sedulur Sikep* sebagai Mulok Terobosan

Komunitas *Sedulur Sikep* menjadi pembicaraan hangat setelah keberaniannya bersama kelompok petani lain menolak kebijakan rencana pembangunan pabrik semen di gunung Kendeng, Sukolilo, Pati. Komunitas *Sedulur Sikep* adalah sekelompok masyarakat adat yang tinggal di pergunungan Kendeng, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Mereka memiliki tradisi yang unik dan kuat diantaranya adalah tidak mau sekolah formal, suka memakai celana pendek hitam, tidak mau berdagang, pantang poligami dan memilih bertani sebagai penopang hidupnya. Komitmen mereka sebagai petani, tidak mau berdagang dan tidak mau sekolah seringkali membuat kebanyakan orang sering menilai mereka sebagai “orang yang bodoh” yang hanya mengandalkan “*pokoke*” dalam hidup (Said, 2009).

Namun di tengah stigma miring seperti itu, ternyata *Sedulur Sikep* memiliki kedalaman nilai dan peduli atas kelestarian lingkungan alam. Mereka paham akar budaya dan seluk beluk lingkungannya. Kegetolan *Sedulur Sikep* menolak industri semen bukan sekedar masalah ekonomi (materi) semata, tetapi terkait masa depan lingkungan, terancamnya sumber mata air, polusi udara, banjir dan eksistensi sosial dan budaya. Maka baginya industri semen akan berdampak pada terjadinya bencana jangka panjang baik bencana sosial, bencana budaya maupun bencana alam.

Suatu kejadian disebut bencana apabila menyebabkan terjadinya ancaman dan gangguan bagi kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat (komunitas tertentu) baik dalam bentuk kerugian korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda (UU RI No. 24 tahun 2007). Termasuk ancaman kelangsungan hidup tentu di dalamnya adalah nilai-nilai sosio-kultural yang tercerabut ketika suatu peristiwa itu terjadi. Maka ketika perusahaan semen didirikan di kawasan lingkungan komunitas *Sedulur Sikep* yang mengharuskan membebaskan puluhan hektar lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka maka hal ini adalah bagian dari “bencana budaya” (Shri Ahimsa-Putra, 2006) yang dialami oleh *Sedulur Sikep* dan juga masyarakat petani lainnya. Bagi *Sedulur Sikep* pilihannya sebagai petani bukannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi hal tersebut sebagai wujud “kesejatian dirinya” dalam memaknai hidup sehingga sarat dengan nilai sehingga terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari yang belakangan populer dengan budaya samanisme.

Dengan demikian pada tingkat tertentu *Sedulur Sikep* telah mencoba melakukan upaya mitigasi bencana di sekitar pantura dan pegunungan Kendeng, karena sejak dini mereka telah mengantisipasi bahaya-bahaya bencana yang sebenarnya telah sering terjadi di sekitar Sukolilo terutama bencana banjir. Mitigasi bencana, prinsipnya adalah berupa tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah itu berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali dengan tindakan fisik seperti membangun bangunan yang lebih kuat hingga aktivitas yang prosedural seperti teknik-teknik yang baku dalam penanggulangan suatu bahaya (dikutip dari modul mitigasi bencana, UNDP Program, 1998).

Fenomena *Sedulur Sikep* dalam menolak pabrik semen adalah bagian dari kontrol masyarakat atas tindakan-tindakan perlindungan sumber mata air dan kekuatan serapan bukit Kartz agar mampu menyimpan air pada saat air melimpah, sehingga bahaya banjir dan kekeringan bisa dihindari. Yang menjadi pertanyaan besar kemudian, mengapa justru komunitas *Sedulur Sikep* yang paling getol menolak rencana pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, yang justru tidak pernah mengenyem bangku sekolah? Lantas dimana kaum terpelajar dan cendekia dalam menghadapi isu lingkungan yang berdampak bagi kelangsungan keseimbangan alam di masa depan?

Tampaknya generasi ini sudah terasing atas lingkungannya sendiri sebagai dampak dari pendidikan yang tereduksi hanya sekedar untuk orientasi kerja. Generasi dididik sekedar untuk mengurus daging (materi), sementara aspek nilai yang immateri kurang mendapatkan proporsinya. Bahkan mulok seringkali sekedar mengedepankan dunia kerja saja, misalnya karena kota wisata lalu muloknya bahasa Inggris, kota industri muloknya managemn ekspor-impor dan seterusnya.

Maka sudah saatnya mengembangkan muatan lokal dengan benar-benar berbasis pada potensi lokal baik potensi positif maupun potensi negatif. Misalnya potensi bencana disetiap daerah adalah berbeda, maka bagaimana memberikan bekal bagi peserta didik dalam menangani bencana dan meminimalisir bahaya bencana.

Di daerah pantura Kudus, Pati, Jepara, Demak hampir semua orang tahu setiap tahun menjadi langganan bencana banjir. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi setiap satuan pendidikan sebagai pertimbangan dalam menanganinya. Karena itu tak berlebihan kalau menjadikan “Pembelajaran Konservasi, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam” sebagai bagian dari alternatif muatan lokal terobosan di setiap satuan pendidikan. Apalagi dunia sedang dihadapkan pada ancaman pemanasan global (*global warming*) yang menuntut perhatian dari setiap elemen masyarakat. Dengan cara ini maka pendidikan telah turut terlibat dalam menjaga keseimbangan lokal dan global, karena itu dalam wacana kurikulum terkini mulai muncul juga isu “transnasional kurikulum”, yakni menjadikan pembelajaran sebagai media memfasilitasi peserta didik untuk melek berbagai problem kemanusiaan mulai dari tingkat lokal, nasional hingga internasional.

Dalam banyak hal ternyata *Sedulur Sikep* telah melakukan dan mempertahankan budayanya dalam bergelut dengan alam secara harmoni, santun dan penuh dengan kepedulian yang tinggi. Maka tidak ada salahnya dalam konservasi alam sebagai dasar mulok bisa belajar kepada komunitas *Sedulur Sikep*. Karena hikmah itu bisa ditemukan dimana-mana. Maka belajarlh meski ke negeri Cina, atau dengan kata lain belajarlh tentang alam meski dengan *Sedulur Sikep*.

Kesimpulan

Pendidikan digagas tak lain untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan secara utuh menembus dimensi fisik maupun psikis. Karena itu pendidikan tidak bisa direduksi hanya sekedar mengantarkan peserta didik untuk memperoleh kepuasan material belaka, sementara yang immaterial seperti nilai sosial, spiritual dan transendental. Karena itu kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kondisi sosial, budaya dan sejarah dimana satuan pendidikan itu diselenggarakan sehingga terbangun proses pendidikan dan pembelajaran berbasis pada lokasi (*place-based education*).

Pesan pendidikan yang paling mendasar adalah mengantarkan individu menjadi manusia pembelajar yang terpupuk *senses of curiosity* (rasa ingin tahu)nya sehingga mereka tetap belajar meski sudah selesai/lulus sekolah di jenjangnya. Maka kesadaran belajar sepanjang hayat (*life long education*) terbangun dan bisa membuka mata dan pikiran (*open mind*) untuk selalu mencari dan menemukan *wisdom* darimanapun datangnya. Dengan demikian akan tercipta generasi yang terbuka, menghargai perbedaan dan keragaman etnis, budaya, golongan dan keyakinan. Maka *peace for all* menuju masyarakat beradab akan terbangun..

DAFTAR PUSTAKA

- Bardy, Laurie. (1983). *Curriculum Development in Australia*. Prentice-Hall of Australia PTY LTD.
- Bourdieu, Pierre, (1990). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, (Cambridge-MA.: Harvard University Press, 1984)
- _____, *The Logic of Practice*, CaliforniaL Sanford University.
- Budiman, Hikmat (ed.), (2007). *Hak Minoritas; Dilema Multikulturalisme Indonesia*, Jakarta: TIFA & The Interseksi Foundation.
- Darmaningtyas, Subkhan, E., dan Panimbang, F. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.
- Hasan, Said Hamid, Prof.. *Kurikulum dan Tujuan Pendidikan*. dalam http://pk.sps.upi.edu/artikel_hamid.html (on line 22 Pebruari 2017)
- Miller, John P., and Wayne Seller, (1985). *Curriculum Perspectives and Practice*, Longman, New York & London.
- Olivia, P.F. (1992). *Developing the Curriculum*. 4th edition. New York: Longman
- Sanjaya, Wina, Dr., (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung. Kencana.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa-, *Gempa Budaya, Budaya Bencana dan Otonomi Daerah, Tafsir Antropologi atas Dampak Gempa Bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah sebagai "Teks"*, Makalah disampaikan dalam diskusi Nasional "Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah", di Yogyakarta, 6-8 Nopember 2006
- Said, Nur, (2009). *Strategi Saminisme Dalam Membendung Bencana Alam; Perlawanan Komunitas Sedulur Sikep terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo Pati*, Yogyakarta: Laporan Riset Studi Agama Lintas Budaya, Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Smith, Anthony Oliver, "Nature, Power, and Culture" dalam, Susanna M. Hoffman dan Anthony Oliver Smith, *Catastrophe & Culture, The Anthropology of Dissaster*, (Oxford: School of American Research Press, 2002)
- Susilo, Joko, (2003). "Bahasa Samin, Suatu Bentuk Perlawanan Sosial, dalam, Nuruddin dkk. *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKIS.
- Susetyo, Heru, (2007). *Belajar dari Pengalaman Bencana*. Jakarta: CIR.
- Smith, Gregory A., *Place-Based Education: Learning to Be Where We Are*, <http://www.clearingmagazine.org/Smith.html> (diakses 1 Maret 2017)
- Tilaar, H.A.R., Prof. Dr., M.Sc., Ed. (1985). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.